

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien agar dapat memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negative atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan public. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relative kecil. Namun, saat ini akuntansi sektor public sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya. (SAP) standar audit pemerintahan *value for money* audit atau audit kinerja adalah pengauditan yang dilakukan untuk memeriksa tingkat ekonomi, efisien, efektifitas pelaksanaan suatu program atau kegiatan dan unit kerja tertentu. Tujuan memperkuat pelaksanaan *value for money* tersebut adalah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas sektor publik. Hal tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah dan lembaga- lembaga pemerintahan daerah dan lembaga keuangan lain yang ada di daerah harus memberikan pertanggungjawaban publik kepada masyarakat. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik sehingga hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah beserta lembaga keuangannya memiliki sistem akuntansi yang baik.

Value For Money (VFM) merupakan konsep yang menilai sejauh mana dana yang dikeluarkan untuk suatu program atau kegiatan yang memberikan manfaat yang optimal, dalam konteks Dinas Pemuda dan Olahraga penerapan prinsip ini sangat relevan karena anggaran yang kelola berhubungan langsung dengan program-program yang mempengaruhi kehidupan generasi muda dan perkembangan olahraga di Kota Bitung. Seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan tuntutan untuk transparansi yang lebih besar, Dinas pemuda dan olahraga

menghadapai tekanan untuk memastikan bahwa anggaran yang mereka kelola digunakan secara efisien dan efektif. *value for money* mengintegrasikan tiga aspek utama: efisiensi, efektivitas, dan ekonomi untuk menilai sejauh mana sumber daya digunakan dengan baik. Efisien berhubungan dengan penggunaan anggaran secara optimal tanpa pemborosan, efektivitas menilai sejauh mana tujuan program tercapai, dan ekonomi memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan harga pasar dan kualitas yang dibutuhkan. Pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas publik dapat dilihat dari beberapa aspek.

Pertama, penerapan prinsip ini mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dengan mengadopsi *value for money* dinas pemuda dan olahraga harus mampu memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana anggaran digunakan dan hasil yang dicapai. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan menilai kinerja dinas, sehingga mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi. Kedua, *value for money* meningkatkan pengelolaan anggaran yang lebih baik dalam praktiknya, dinas pemuda dan olahraga harus merencanakan dan melaksanakan program dengan pertimbangan yang matang mengenai manfaat yang akan diperoleh di bandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini membantu mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan kontribusi positif terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, prinsip *value for money* berkontribusi pada peningkatan kinerja. Dengan terus mengevaluasi dan mengoptimalkan penggunaan anggaran berdasarkan prinsip ini, dinas pemuda dan olahraga dapat meningkatkan kualitas layanan dan mencapai tujuan program. Peningkatan kinerja ini tidak hanya memenuhi ekspektasi masyarakat tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan dinas dalam mengelola anggaran secara efektif. Keempat, prinsip *value for money* mendukung tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Dinas pemuda dan olahraga, fokus pada evaluasi berkelanjutan terhadap nilai yang diperoleh dari setiap pengeluaran, harus bertanggungjawab atas keputusan dan hasil yang dicapai. Ini menciptakan mekanisme kontrol dan evaluasi yang lebih kuat, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas publik. Secara keseluruhan, *value for money* pada dinas pemuda dan olahraga kota Bitung berperan penting dalam meningkatkan

akuntabilitas publik. Dengan ini dinas tidak hanya memastikan bahwa anggaran yang digunakan dengan cara yang paling efektif tetapi juga meningkatkan transparansi, kinerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya. Ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat memastikan bahwa setiap investasi publik memberikan manfaat maksimal dan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama *value for money* adalah menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga keuangan kepada masyarakat, yang sering disebut sebagai akuntabilitas publik. Pada dasarnya, bentuk pertanggungjawaban/ akuntabilitas yang dilaksanakan secara periodik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat dan daerah harus menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak pemberi informasi dan juga hak untuk di dengar aspirasinya. Oleh karena itu akuntabilitas publik dapat dibedakan menjadi dua macam, yang pertama Akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang paling tinggi. Akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban instansi atau sektor publik kepada publik yaitu masyarakat. Oleh sebab itu, suatu organisasi sektor publik dituntut agar mampu meningkatkan penyelenggaraan akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal dengan baik dan dalam rangka mewujudkan suatu penerapan dimensi *value for money* (Mardiasmo, 2018:20).

Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme pelaporan serta pertanggung jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal, pada era desentralisasi dan otonomi daerah para manajer public dapat diharapkan mampu melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan yang pasif menjadi seorang yang bisa berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas menjadi lebih luas dari sekedar proses formal serta saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, makna akuntabilitas bisa menjadi luas dari sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi sehingga akuntabilitas harus merujuk pada spektrum yang

luas dengan kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban Amanah publik.

Dinas pemuda dan olahraga mempunyai tugas membantu walikota dalam mutu melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang pembudayaan olahraga, bidang peningkatan prestasi olahraga, bidang pengembangan dan pemasaran, bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia kepemudaan. Pada dinas pemuda dan olahraga di kota bitung memiliki 4 bidang, bidang Layanan Kepemudaan tugas yang dilakukan pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan dibidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan. Bidang Pembudayaan Olahraga tugas yang dilakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan bidang pembibitan olahraga pelajar, mahasiswa dan peningkatan kualitas pengelola serta pelaku olahraga. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Bidang Sarpras dan Kemitraan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Ika berty, Raisya Zenita dan Satria Tri Nanda,2020). penelitian *value for money* digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dinas dalam pengelolaan keuangan. Dinas kesehatan kota pekanbaru berdasarkan data APBD dari 2018-2020 mengalami kenaikan dan penurunan yang disebabkan salah satunya yaitu tidak terlaksana nya program kerja pemerintah yang telah di anggarkan yang diakibatkan adanya kendala-kendala seperti keterbasan sumber daya manusia, pencairan dana dan permasalahan lainnya. Pada 2020 pencapaian realisisasi mengalami kenaikan dimana kenaikan tersebut terjadi karena dimana kenaikan tersebut terjadi karena program yang dianggarkan pemerintah pusat dalam menanggulangi pandemi covid. Berdasarkan naik atau turunnya kualitas di dinas terhadap penyalagunaan anggaran peneliti menggunakan konsep *value for money* untuk melihat kinerja dari akuntabilitas publik pada dinas kesehatan.

Alasan memilih judul terdapat banyak fenomena yang sering terjadi sekarang di instansi pemerintahan baik dipusat maupun di daerah, ada permasalahan yang menjanggal sehingga saya tertarik untuk mengangkat judul pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas publik pada dinas pemuda dan olahraga di kota bitung

https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fberitaonlinelokal%2Ecom%2Ffastaga%2Ddana%2Dpramuka%2Dlenyap%2Ddi%2Ddinas%2Dpemuda%2Ddan%2Dolahraga%2Dkota%2Dbitung%2F&utm_source=igadl%2Cigatpdl%2Csh%2Ffx%2Fgs%2Fm%2F5. Dari fenomena yang terjadi alasan semakin menguat untuk menggunakan konsep *value for money* karena konsep *value for money* dinilai dapat menjadikan uang lebih berharga dan penting dalam pengelolaan anggaran publik karena menilai sejauh mana dana yang dikeluarkan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam konteks dinas pemuda dan olahraga, di mana alokasi anggaran sering kali besar dan berdampak langsung pada kegiatan masyarakat, memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil yang maksimal adalah krusial. Kedua, akuntabilitas publik merupakan prinsip dasar dalam administrasi pemerintahan yang baik, di mana lembaga pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan programnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan prinsip *value for money* mempengaruhi akuntabilitas dinas dalam melaksanakan program-programnya.

Alasan memilih tempat di dinas pemuda dan olahraga kota bitung yaitu dari sumber yang didapatkan di atas menjelaskan bahwa adanya kegagalan yang terjadi terhadap anggaran yang diusulkan untuk pramuka kota bitung sekitar 300 juta namun yang disetujui hanya 150 juta dan anehnya dana yang jumlahnya ratusan juta kini hanya tinggal sebesar 60 juta dan sisanya tidak diketahui kemana, yang seharusnya dinas pemuda dan olahraga dapat memberikan akses agar setiap program ataupun kegiatan dapat berjalan sesuai dengan anggaran, akan tetapi DISPORA belum mampu untuk menggunakan anggaran secara transparansi. Berdasarkan penjelasan di atas sertakan ada kegagalan, maka Penulis melakukan penelitian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bitung untuk mengukur

-PENGARUH VALUE FOR MONEY TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA (DISPORA) PEMERINTAH KOTA BITUNG”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ekonomi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) di Kota Bitung ?
2. Apakah efisiensi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) di Kota Bitung ?
3. Apakah efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) di Kota Bitung ?
4. Apakah ekonomi, efisiensi, efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas publik Dinas Pemuda dan Olahraga di Kota Bitung ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ekonomi mempengaruhi akuntabilitas publik di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) di Kota Bitung
2. Untuk mengetahui apakah efisiensi mempengaruhi akuntabilitas publik di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) di Kota Bitung
3. Untuk mengetahui apakah efektivitas mempengaruhi akuntabilitas publik di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) di Kota Bitung

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai manfaat kajian yang dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis atau siapa saja berminat mengetahui lebih dalam mengenai konsep *value for money* dan cara penerapan dalam sektor pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bentuk sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi pihak Kota Bitung dalam pencapaian pelayanan publik melalui pendekatan *value for money* dan bisa menjadi masukan dalam kualitas pelayanan publik.

3. Sebagai bahan kajian serta pertimbangan untuk penelitian yang serupa di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam menyusun skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada Bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu, Model Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisi tentang Waktu dan Tempat Penelitian, Populasi dan Metode Pengambilan Sampel, Definisi Operasional Variabel, Metode Pengumpulan Data, Dan juga Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi gambaran umum Objek Penelitian, Sejarah Perusahaan, Hasil Analisis, Pembahasan terkait hasil analisis yang didapatkan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga saran yang diberikan terkait hasil penelitian yang didapatkan.

UKDLSM